



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.15, No.1, Juni 2018

TURBULENSI KEPEMIMPINAN DAN KONEKTIVITAS ANTAR NEGARA

- Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un
- Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016
- Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia:
Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas
- Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatahan Dunia
- Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka:
City to City Connectivity sebagai Pendukung Koridor Ekonomi

RESUME PENELITIAN

- Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

REVIEW BUKU

- Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar
Melalui Institusi Multilateral Independen

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 1	Hlm. 1-127	Jakarta, Juni 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------



Mitra Bestari

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Dewan Redaksi

Redaksi Pelaksana

Sekretaris Redaksi

Produksi dan Sirkulasi

Alamat Redaksi

ISSN

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktik kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un	
Indriana Kartini	1–13
• Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016	
Meutya Viada Hafid	15–30
• Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas	
Arif Novianto, dkk	31–48
• Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia	
Siswanto	49–63
• Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka: <i>City to City Connectivity</i> sebagai Pendukung Koridor Ekonomi	
Awani Irewati	65–80
Resume Penelitian	
• Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik	
Nyimas Latifah Letty Aziz, dkk	81–96
• Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab	
M. Fakhry Ghafur, dkk	97–113
Review Buku	
• Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen	
Defbry Margiansyah	115–125
Tentang Penulis	127–128
Pedoman Penulisan	129–133

CATATAN REDAKSI

Kepemimpinan politik mengalami dinamika menyesuaikan kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Tak pelak kondisi tersebut menimbulkan konsolidasi di tingkat kepemimpinan maupun justru sebaliknya menimbulkan turbulensi. Meski demikian, konsensus merupakan upaya yang mesti dilakukan dalam menjaga stabilitas nasional maupun hubungan antar negara.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan kepemimpinan. Artikel pertama yang ditulis oleh Indriana Kartini berjudul "DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN", menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom.

Artikel berikutnya, "KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016". Artikel yang ditulis oleh Meutya Viada Hafid ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016.

Sementara itu, artikel "DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS" yang ditulis oleh Arif Novianto, dkk mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme.

Turbulensi kepemimpinan di Amerika Serikat juga dibahas dalam artikel "KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA" yang ditulis oleh Siswanto. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Kebijakan membela kepentingan nasional (*America First*) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (*make America great again*) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian in-konsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Artikel terakhir membahas tentang "DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI" yang ditulis oleh

Awani Irewati. Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Selain kelima artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, dan Nostalgawan Wahyudi, “PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI, KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB”. Tulisan ini mengulas berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas

dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif.

Naskah kedua, “POLA PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA: PERSPEKTIF POLITIK”, ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, dan Yusuf Maulana. Tulisan ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Adam Bower “NORMS WITHOUT THE GREAT POWERS: INTERNATIONAL LAW AND CHANGING SOCIAL STANDARDS IN WORLD POLITICS”. *Review* yang ditulis Defbry Margiansyah menelaah tentang institusi internasional dan aturan-aturannya dekade belakangan dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku *Norms Without Great Powers* memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana

dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemimpinan maupun konektivitas antar negara. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian

Politik

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 1-13

Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina.

Kata kunci: Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 15-30

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Mereka bertindak bukan hanya sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI, tetapi perubahan tersebut tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI

diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik dari Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan musyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Kata kunci: Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan dan Samodra Wibawa

DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 31-48

Dalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut.

Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tangga-tangga menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.

Kata kunci: Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas

DDC: 321.804273

Siswanto

KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 49-63

Latar belakang penulisan artikel ini didasari oleh pertimbangan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Selanjutnya masalah yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah kepribadian inkonsisten Presiden Donald Trump yang berpengaruh kepada lahirnya kebijakan-kebijakan kontroversi. Kebijakan membela kepentingan nasional (America First) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (make America great again) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian inkonsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Kata kunci: kontroversi, turbulensi, kebijakan Amerika, Presiden Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 65-80

Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Kata kunci: kerja sama subregional, *city to city connectivity*, koridor ekonomi, Selat Malaka

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

RESUME PENELITIAN
POLA PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA OTONOMI
KHUSUS DAN ISTIMEWA:
PERSPEKTIF POLITIK

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 81-96

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan

antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.

Kata kunci: pengawasan, dana otsus/istimewa, perspektif politik.

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

RESUME PENELITIAN
PROBLEMATIKA KEKUATAN
POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI,
KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 97-113

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yang diperkaya dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh pendalaman,

penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Di antaranya melalui berbagai literatur, jurnal, media elektronik dan cetak, juga media internet yang memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji. Untuk menghasilkan analisis yang tajam dan akurat, dilakukan penelitian lapangan di Arab Saudi (Jeddah, Mekkah dan Madinah) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para pakar, akademisi di beberapa universitas, dan tokoh yang terkait dengan pokok kajian.

Kata kunci: Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

DDC: 341

Defbry Margiansyah

REVIEW BUKU

KEKUATAN SOSIAL HUKUM: MENUNDUKKAN NEGARA KEKUATAN BESAR MELALUI INSTITUSI MULTILATERAL INDEPENDEN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 115-125

Dalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku *Norms Without Great Powers* memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi

tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Kata kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau.

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

**PANMUNJOM DECLARATION AND
KOREAN PEACE PROSPECTS IN
MOON JAE-IN AND KIM JONG-UN
ERA**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 1-13

The Panmunjom Declaration signed by two Korean leaders, Moon Jae-in from South Korea and Kim Jong-un from North Korea marked a new era in peace on the Korean Peninsula. Although skepticism about positive implications has emerged both domestically and internationally, the commitment of the two Koreas to end the war should be appreciated by the international community. This paper analyzes how the Panmunjom Declaration influences regional and international security as well as the prospects for Korean peace and unification after the Panmunjom agreement. Based on the analysis through a qualitative approach, it can be concluded that although there were some similarities between the Panmunjom High Level Meeting and the previous High Level Meetings in 2000 and 2007, what needs to be underlined is the fact that the two Korean countries still have the desire to create a peace regime. Although in realizing this, the involvement of two allied countries in Korea, namely the US and China, is still needed.

Keywords: Panmunjom Declaration, Korean peace, South Korea, North Korea, Moon Jae-in, Kim Jong-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

**POLITICAL CONSENSUS ON
GOLKAR PARTY CONFLICT IN
2014-2016**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 15-30

This study discusses the phenomenon of political consensus of Golongan Karya (Golkar) Party after internal conflict in 2014-2016. The Golkar Party consensus is a new phenomenon, because the previous Golkar Party conflict has always brought new parties. The results of the study showed that the Golkar Party consensus occurred in the three stages. First stages through the organization's channels, namely the Golkar Party Court, the second through legal channels, the third through the political channels. The political channels shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub Golkar Party in May 2016. Munaslub agreed on various matters, including (1) the decision to set Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) the change of Golkar Party's position to the supporting party of Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The political consensus of Golkar Party in 2016 was also conducted through intermediaries. The intermediaries in the political consensus of Golkar Party are Jusuf Kalla and Luhut Panjaitan acting as government representatives and also as Golkar Party officials. The new Golkar Party Leaders also made changes in the Golkar faction of the House of Representatives. Unlike before where the losing faction was removed, the Chairman of the Golkar Party Faction was filled by Setya Novanto (from

Aburizal Bakrie faction) and Secretary of Golkar Party Faction filled by Agus Gumiwang Kartasasmita (from Agung Laksono faction). While the Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I and II are affected by the conflict at the Center, also reorganized by leaders of the new Golkar Party. In each DPD I and II, participatory discussion was conducted to elect the leaders of the Golkar Party DPD, in purpose to unify the two stewardship in the region. As for Aburizal Bakrie and Agung Laksono, each given a position on the management of the Golkar Party. Aburizal Bakrie was given the position as Chairman of the Advisory Council of Golkar Party which last appeared during the New Order; while Agung Laksono was given the position of Chairman of the Golkar Party Expert Council.

Keywords: Golkar Party, Political Consensus, Political Party, Indonesia

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan and Samodra Wibawa

DYNAMICS OF DEMOCRATIC PEOPLE PARTY (PRD) MOVEMENTS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF REVOLUTIONARY PARTY AND BROAD-LEFT PARTY PERSPECTIVES

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 31-48

Within a Marxist tradition, social movements and social changes cannot be viewed as separated from the class contradictions and struggles as well as the roles played by mass organisations or parties. The current development of Marxism resulted in the emergence of two polar traditions in political parties, between those with a vanguardist or revolutionary leanings and those of social-democratic or broad-left leanings. These two tendencies have their own advantages and drawbacks depending on the circumstances in which they operated. This study attempts to elaborate the movement dynamics of People's Democratic Party (PRD) in their efforts to achieve the ideals of socialism which they championed. I divided the history of PRD into two different periods, between the New Order period in which they maintained a revolutionary-vanguard tendency and the post-Reformasi period in which there is a shift towards social-democratic tendency that emphasised Soekarnoist ideology. This study also tries to uncover the material basis behind such

changes. Analysing these changes is crucial because the shift in tendency influenced the changes in the strategies to oppose capitalism and the tactics to establish the various steps towards socialism.

Keywords: Marxism, People's Democratic Party, Revolutionary Party, Broad-Left Party

DDC: 321.804273

Siswanto

LEADERSHIP OF DONALD TRUMP AND TURBULENCE OF WORLD ORDER

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 49-63

The background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.

Keywords: controversy, turbulence, American policy, President of Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DYNAMIC OF SUB-REGIONAL COOPERATION IN MALACCA STRAITS: CITY TO CITY CONNECTIVITY AS A SUPPORTING ECONOMIC CORRIDOR

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 65-80

Connectivity is one of the important factors in building a cooperation at bilateral, regional and international levels. City to city connectivity realm becomes the backbone in an economic corridor of a subregional cooperation like IMT-GT. This article presents a review of the dynamics of the two economic corridors, namely Medan–Penang Island connectivity and Dumai–Melaka connectivity at the Straits of Malacca, and a little review of the future of city to city connectivity for Indonesia and Malaysia. The writing method of this article is based on qualitative analysis, with the essence of the findings are that as the smallest node in connectivity realm, these two connectivities determine the dynamics of the economic corridors between Indonesia and Malaysia. And this condition will remain as an determining factor for the sustainable cooperation between the two countries, and for subregional cooperation of the IMT-GT in the future.

Keywords: subregional cooperation, city to city connectivity, economic corridor, the straits of Malacca

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

SUMMARY RESEARCH
THE CONTROL PATTERN OF
SPECIAL FUND MANAGEMENT:
POLITICAL PERSPECTIVE

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 81-96

This study examines the special fund management control patterns from a political perspective. There are three areas studied namely, Aceh, Papua, and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). These three areas are important to be learned since they have specialization and privileges in fiscal management, particularly special fund management. However, central government oversight of special fund management is weak. This is evidenced by the lack of supervision in terms of synergy, coordination, supervision, and supervision between levels of government (province/district). As a result, special fund management does not have a significant impact on improving democratic and harmonious governance through vertical (central-local) or

horizontal (local-local) relationships and improving the welfare of local communities. Therefore, this study proves the importance of monitoring to special fund management. The research methods are conducted through collecting supporting documents, in-depth interviews, and focus group discussion.

Keywords: controlling, special fund, a political perspective

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgiaawan Wahyudi

SUMMARY RESEARCH
PROBLEMS OF THE POWER OF
POLITICAL ISLAM IN SAUDI
ARABIA, KUWAIT AND UNI EMIRAT
ARAB

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 97-113

Political Islam has a significant influence for a political dynamics in Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates. The Gulf War in 1991 has become catalyst for changes of monarchy policy, both internal and external. In Saudi Arabia the Islamist movement and their anti-liberal supporters took place during and after the war, which demanded change. While in Kuwait, the monarchy moves the opposition group. The formation of opposition Islamic Constitutional Movement (ICM) group against the government has attracted Muslim Brotherhood (IM) in a political conflict for reform. This is a challenge for ICM to gain wider political influence in the political constellation in Kuwait. While in the United Arab Emirates, the government claim the opposition as a threat for national security. The various of political Islam activities in Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates will be the focus of the research. The Research methods in this study used a qualitative methodology through deskriptive-analytical approach, fortified with the study literature and the fieldworks. To obtain deepening, this research begins by the searching of primary and secondary data through literature study. Among them through a various literature, journals, electronic media, well as the internet that provide important information for analysis and identify of map the Issues. To produce a sharp and accurate analysis, the studies the field research was conducted in saudi arabia (Jeddah, Mecca and Medina) through indepth interviews with experts,

academics at several universities and figures related with the subject matter.

Keywords: *Political Islam, Saudi Arabia, Kuwait, and United Arab Emirates*

DDC: 341

Defbry Margiansyah

BOOK REVIEW

THE SOCIAL POWER OF LAW: TAMING GREAT POWERS THROUGH INDEPENDENT MULTILATERAL INSTITUTIONS

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 115-125

For last decade, international institutions along with their rules have been perceived merely as an instrument for maintaining influences and interests of great power countries. However, Norms Without Great Powers offers novel theoretical account regarding the prospect for independent international institutions in the times of great powers ambivalence, such as United States, through the effects of “nested” social structure of international law. This research shows how social dimension of normative

international law shapes and restricts the behavior and expectation of the states in the conduct of international relations. The theoretical postulation drew on constructivist approach applied on empirical inquiry of of the Mine Ban Treaty and Rome Statute of International Criminal Court’s comparative case study. This article aims to highlight and review the book’s analysis critically. To this end, the critical review begins by elucidating main arguments, then providing presentation on main points of respective case studies. Finally theory-guided evaluation and its consequences on problems founds in the case of international law’s implementation promoted by “non-great power” multilateral institution will come up prior to concluding remarks.

Keywords: *Multilateralism, international law, norms, power politics, ICC, MBT*

DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS¹

DYNAMICS OF DEMOCRATIC PEOPLE PARTY (PRD) MOVEMENTS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF REVOLUTIONARY PARTY AND BROAD- LEFT PARTY PERSPECTIVES

Arif Novianto

Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada (MAP - UGM)
email: arif.novianto@mail.ugm.ac.id

Lukman Kurniawan

Departemen Sosiologi FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM)

Samodra Wibawa

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM)

Diterima: 13 Maret 2018; direvisi: 2 Mei 2018; disetujui: 26 Juni 2018.

Abstract

Within a Marxist tradition, social movements and social changes cannot be viewed as separated from the class contradictions and struggles as well as the roles played by mass organisations or parties. The current development of Marxism resulted in the emergence of two polar traditions in political parties, between those with a vanguardist or revolutionary leanings and those of social-democratic or broad-left leanings. These two tendencies have their own advantages and drawbacks depending on the circumstances in which they operated. This study attempts to elaborate the movement dynamics of People's Democratic Party (PRD) in their efforts to achieve the ideals of socialism which they championed. I divided the history of PRD into two different periods, between the New Order period in which they maintained a revolutionary-vanguard tendency and the post-Reformasi period in which there is a shift towards social-democratic tendency that emphasised Soekarnoist ideology. This study also tries to uncover the material basis behind such changes. Analysing these changes is crucial because the shift in tendency influenced the changes in the strategies to oppose capitalism and the tactics to establish the various steps towards socialism.

Keywords: *Marxism, People's Democratic Party, Revolutionary Party, Broad-Left Party*

Abstrak

Dalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi

¹ Artikel Jurnal Ilmiah ini adalah ringkasan dari penelitian yang dilakukan penulis bekerjasama dengan Pusat Studi Jerman (Pusman) UGM pada tahun 2015 dengan judul: Krisis Kapitalisme dan Dinamika Gerakan Kiri dalam Pemilu: Studi Perbandingan Indonesia dan Yunani.

tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut. Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tangga-tangga menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.

Kata kunci: Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas

Pendahuluan

Sejarah terbentuknya Indonesia sebagai negara-bangsa salah satunya dipengaruhi oleh kaum pergerakan yang beraliran politik kiri (sosialis dan komunis). Takasi Shiraishi memperlihatkan bahwa pada awal abad ke-20 pembentukan itu dibangun melalui apa yang disebut sebagai “zaman bergerak”². Selama seperempat abad pertama, pergerakan Indonesia memperlihatkan kesadaran politik baru yang menjadi cikal bakal nasionalisme Indonesia dan itu dipengaruhi oleh Islamisme dan Komunisme³. Pada masa kolonialisme dengan sistem politik tertutup⁴ yang diterapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda, maka pergerakan yang dilakukan lebih bersifat ekstra-parlementer (terutama dilakukan oleh gerakan kiri). Gerakan kemerdekaan memfokuskan perjuangan merebut kekuasaan melalui jalur non-formal, yaitu melalui pemogokan, pendudukan, pengambilalihan paksa, dan perang.

Setelah kemerdekaan Indonesia, struktur politik terbuka mulai diterapkan. Berbagai partai politik dari aliran ideologi yang berbeda turut bergerak dalam struktur politik terbuka tersebut. Mereka melibatkan diri dalam pemilu seperti yang terjadi pada pemilu pertama

secara demokratis pada tahun 1955. Hampir semua garis ideologi politik terlibat dalam pemilu di tahun 1955 ini⁵. Gagasan Nasakom (Nasionalis, Agamis, & Komunis) dari Soekarno terejawantahkan dalam proses pemilu itu. Empat besar pemenang pemilu 1955 ini memiliki garis ideologi Nasakom, seperti PNI yang Nasionalis, NU dan Masyumi yang Agamis, dan PKI yang Komunis.

Akan tetapi sejak PKI (Partai Komunis Indonesia) dihancurkan oleh rezim Orde Baru karena dituding dalang pemberontakan peristiwa 01 Oktober 1965⁶, hampir tidak ada partai berhaluan kiri yang dibiarkan berorganisasi dan bergerak oleh penguasa⁷. Naiknya Soeharto tidak hanya melengserkan Soekarno dari tampuk kepemimpinan Indonesia, tapi juga penghancuran gerakan kiri dan kapasitas rakyat untuk bergerak, berorganisasi dan berpolitik. Kebijakan “massa mengambang” (*floating mass*) lahir dari dinamika politik tersebut. Tujuannya untuk menjadikan rakyat buta politik dan pro status-quo⁸. Peristiwa itu juga menjadi titik balik ekonomi politik Indonesia, dari yang cenderung

² Takasi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005).

³ Untuk penjelasan lebih mendalam, lihat: Ruth T. McVey, *Kemunculan Komunisme Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010); Takasi Shiraishi, *Zaman Bergerak...*; Max Lane, *Malapetaka Di Indonesia; Sebuah Esei Renungan Tentang Pengalaman Sejarah Gerakan Kiri*, (Jakarta: Djaman Baroe, 2012)

⁴ Tidak adanya pemilu, pelarangan terhadap organisasi massa dan partai politik, tidak ada jalur formal untuk merebut kekuasaan, dibungkamnya hak-hak politik masyarakat pribumi, politik hukuman (dari hukuman mati dan penahanan) dan pembuangan yang dilakukan terhadap mereka yang mengamcam kekuasaan kolonial, dan tidak ruang kontrol politik terhadap kebijakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda.

⁵ Lihat: Peter Edman, *Komunisme Ala Aidit: Kisah PKI di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1965*, (Jakarta: Center for Information Analys, 2007).

⁶ Lihat: John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008); Olle Tornquist, *Penghancuran PKI*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011).

⁷ Terjadi selama masa awal dan pertengahan pemerintahan Soeharto, namun kemudian muncul berbagai organisasi dan partai dengan garis politik kiri seperti PRD. Dengan dalih ideologi Pancasila dan stabilitas kemudian PRD ditetapkan sebagai partai terlarang.

⁸ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 110.

pro-timur dengan gagasan sosialisme menjadi pro-barat yang kapitalistik.

Tulisan ini mencoba mengelaborasi bagaimana struktur politik tertutup dijalankan oleh regim Orde Baru dengan melakukan pendisiplinan dan bagaimana dinamika perlawanan yang dilakukan oleh salah satu gerakan kiri yaitu Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam memperjuangkan ideologi politik mereka dan menentang kekuasaan yang *authoritarian* dari Orde Baru. Selain itu, tulisan ini juga menguraikan perubahan kekuasaan dari Orde Baru ke era Reformasi yang juga turut membuka struktur politik dalam jalur kekuasaan dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh PRD. Penulis berupaya menganalisis pergerakan PRD dengan menggunakan perspektif Marxist dan teori partai yaitu partai pelopor dan partai kiri luas.

Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas: Sejarah, Strategi, dan Taktik

Dalam gerakan kiri⁹ peran dari organisasi dan partai politik menjadi sesuatu yang fundamental untuk memperjuangkan tujuan dan cita-cita mereka. Karl Marx memiliki peran penting dalam merumuskan pondasi tentang Sosialisme ilmiah,¹⁰ setelah sebelumnya kaum Sosialis

⁹ Separasi antara gerakan kiri (*left-wing politics*) dan gerakan kanan (*right-wing politics*) merupakan klasifikasi posisi politik atau ideologi dalam dimensi politik yang bersifat independen. Terminologi gerakan kiri dan gerakan kanan ini pertama kali muncul pada masa Revolusi Perancis di tahun 1789 sampai 1799 (Knapp & Wright, 2006). Kaum republik yang menentang *Ancien Regime* di klasifikasikan sebagai kelompok kiri, karena dalam setiap sidang selalu duduk disebelah kiri presiden di parlemen. Sedangkan kaum monarkis yang menjadi pendukung *Ancien Regime* duduk disebelah kanan ruangan dewan parlemen Prancis, sehingga kemudian disebut sebagai kelompok kanan. Namun setelah berakhirnya Revolusi Perancis, diskursus spektrum politik gerakan kiri dan gerakan kanan meluas. Kelompok kanan kemudian digunakan untuk menunjuk pada kelompok konservatif, reaksioner, Kristen demokrat, liberal klasik dan neo-konservatif (Knapp & Wright, 2006). Fasisme dan konservatisme merupakan ideologi politik yang berada dalam lingkaran kelompok kanan ini. Sedangkan gerakan politik kelompok kiri pada perkembangannya digunakan untuk menunjuk pada kelompok sosial demokrasi, sosialisme, marxisme, anarkisme dan komunisme. Kelompok-kelompok ini merupakan mereka yang memperjuangkan pembangunan manusia, demokrasi, kesetaraan, hak-hak masyarakat dan kesejahteraan kelas proletar.

¹⁰ Istilah sosialisme ilmiah pertama kali digunakan oleh Fredrick Engels untuk merujuk pada gagasan bahwa sosialisme dapat terbentuk berdasarkan metode ilmiah yang menganalisis tentang

seperti Robert Owen, Cabet, dan Charles Fourier terjebak pada tendensi Sosialisme utopis¹¹. Marx melalui berbagai karyanya mampu mengurai sistem kerja kapitalisme dengan penelitian yang berangkat dari hukum alamiah corak produksi kapitalis. Salah satu karya paling penting Marx yaitu *Das Capital*¹² menunjukkan kenyataan riil adanya kontradiksi dalam sistem kapitalisme dan itu menciptakan krisis imanen yang sampai sekarang terus terjadi.

Marxisme menjadi sebuah teori yang sangat berpengaruh di dunia sepanjang dua setengah abad terakhir. Namun, ada ruang kosong yang tidak secara spesifik dijelaskan oleh Karl Marx yaitu terkait strategi politik dan konsepsi organisasi atau partai dalam memperjuangkan sosialisme ilmiah. Hal itu pada perkembangannya (setelah meninggalnya Karl Marx) telah melibatkan perdebatan teoritis dan praksis antara para marxis seperti Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Bernstein, Lenin, dan Trotsky¹³. Mereka terlibat polemik tentang konsep partai Marxis, strategi menuju revolusi, peran negara sosialis, dan juga tentang pengorganisasian massa.

Konsepsi teoritik terhadap partai politik dalam Marxisme memunculkan dua teori utama, yaitu konsep partai pelopor (*vanguard party*) dan partai kiri luas (*broad-left party*). Partai pelopor sering disebut sebagai partai

hukum dialektika dan kontradiksi dalam kapitalisme sehingga memberi petunjuk tentang kemungkinan dari sosialisme ini. Gagasan sosialisme ilmiah ini banyak menggunakan konstruksi teoritis dari Karl Marx dan berkebalikan dengan apa yang disebut Engels sebagai sosialisme utopis. Selengkapnya lihat Fredrick Engels, "Socialism: Utopian & Scientific", dalam Karl Marx & Fredrick Engels, *Marx & Engels Selected Works Volume 3*, (Moscow: Progress Publishers, 1970).

¹¹ Sosialisme Utopis adalah cita-cita tentang masyarakat yang adil makmur, tanpa adanya eksploitasi, dan tanpa adanya kelas sosial akan tetapi tidak memiliki pijakan secara ilmiah dengan atau melalui apa masyarakat tersebut akan terbentuk. Tiga tokoh terkenal dalam gagasan sosialisme utopis ini adalah Saint Simon, Charles Fourier dan Robert Owen. Selengkapnya lihat Fredrick Engels., hlm. 95-151.

¹² Karl Marx, *Capital Volume 1: A Critique of Political Economy*, (London: Penguin Classics, 1992).

¹³ Pada perkembangannya, perdebatan tentang strategi gerakan turut berkembang hingga memunculkan garis politik neo-marxis dan post-marxis. Selengkapnya silahkan lihat Arif Novianto, *Mendistorsi Hegemoni dan Anti-Esensialisme: Analisa "Mitos Kesejahteraan untuk Tambang" dalam Kerangkeng Liberalisme*. Jurnal Bhumi 3 (No. 2 November 2017), hlm. 279 – 285.

Leninis¹⁴, itu karena Lenin menjadi orang yang mengembangkan konsep partai pelopor ini. Ciri utama partai pelopor adalah sebuah partai yang menjadi kendaraan untuk mempersiapkan jalan bagi revolusi dan bukan menunggu proses tersebut. Proses revolusi yang dimaksud adalah perjuangan untuk merubah secara total hubungan kekuasaan dalam masyarakat dengan tujuan akhir masyarakat tanpa kelas. Salah satu tugas kaum pelopor menurut Lenin adalah untuk memberi tauladan pergerakan, menggugah kesadaran dan memberi dorongan kepada massa non-partai pelopor untuk mencapai proses revolusi sosialis¹⁵.

Pola rekrutmen anggota yang dijalankan partai pelopor bersifat ketat. Mereka tidak sembarangan merekrut anggota. Dalam teorinya hanya orang yang memiliki kedisiplinan baik secara organisasi, politik, maupun ideologi Marxis dapat menjadi anggota. Itu karena anggota partai pelopor dituntut untuk menghabiskan waktu demi waktu secara sabar terlibat dalam perjuangan kecil, baik untuk belajar bagaimana memimpin sebagai individu dan membangun sebuah partai dengan kapasitas untuk memimpin sebuah revolusi di masa depan¹⁶. Partai pelopor menurut Lenin sebagai partai yang membawa bersama-sama bagian kelas yang paling sadar dan militan dari kelas pekerja, baik sebelum situasi revolusioner terjadi maupun saat situasi krisis¹⁷.

Lenin menekankan menjadi pelopor berarti tidak memisahkan diri dari gerakan di akar rumput. Lenin menulis dalam "*On the Significance of Militant Materialism*" (1922) bahwa:

¹⁴ *Leninisme merupakan istilah yang muncul pertama kali ketika kongres Komintern V (1924) yang dipopulerkan oleh Grigory Yevseevich Zinoviev. Pada perkembangannya istilah Leninisme adalah untuk merujuk pada sumbangsih teori dan konsep yang dikembangkan Lenin, sebagaimana juga Marxisme yang merujuk pemikiran Marx.*

¹⁵ V. I. Lenin, *The Revolutionary Proletariat Party of a New Type*, (San Fransisco: Proletarian Publisher, 1975).

¹⁶ Phil Gasper, "Rediscovering Lenin: Lenin Led a Successful Workers' Revolution, But Are His Ideas About Organization Still Relevant Today?", 2010, <http://isreview.org/issue/88/rediscovering-lenin>, diakses pada 29 Juli 2015.

¹⁷ Cannon, James P. (1967). *The Revolutionary Party & Its Role in the Struggle for Socialism*. International Socialist Review, Vol. 28, No.5, (September-October 1967).

Salah satu kesalahan terbesar dan paling berbahaya dari kaum Komunis (*merujuk pada kaum revolusioner dan partai pelopor - pen*) adalah gagasan bahwa revolusi dapat dibuat oleh kaum revolusioner sendiri. Sebaliknya, keberhasilan dari gerakan revolusioner memerlukan pemahaman tentang ide revolusioner dari kaum pelopor. Sebuah garda depan (*kepeloporan - pen*) melakukan tugas sebagai garda depan ketika mereka tidak memisahkan diri dengan massa dan mampu benar-benar memberi tauladan dan menggugah perlawanan mereka ke depan¹⁸.

D'Arcy merangkum konsep organisasi partai pelopor Lenin menjadi enam poin sebagai berikut¹⁹: *Pertama*, bahwa bentuk organisasi berupa partai politik harus menjadi wadah utama dalam memimpin gerakan anti-kapitalis, dibanding serikat buruh atau koperasi²⁰; *kedua*, bahwa partai harus menjadi partainya aktivis termaju dalam gerakan buruh, bukannya partai kelas pekerja secara keseluruhan²¹; *ketiga*, bahwa partai harus sentralis dalam hal kebijakan praktis, bukannya pluralis²²; *keempat*, bahwa sentralisme partai perlu diatur oleh hirarki komando dan kontrol terhadap kepengurusan partai, dengan badan yang lebih rendah bertindak di bawah arahan badan yang lebih tinggi²³; *kelima*, bahwa partai harus berupaya berpartisipasi dan menanamkan pengaruhnya dalam organisasi massa gerakan buruh (seperti serikat buruh dan koperasi) bukannya membangun alternatif lain terhadap organisasi tersebut²⁴; dan *terakhir*, bahwa kerja-

¹⁸ Dalam V. I. Lenin, *The Revolutionary Proletariat...*

¹⁹ Stephen D'Arcy, "Strategy, Meta-strategy and Anti-Capitalist Activism: Rethinking Leninism by Re-reading Lenin", *the Journal of the Society for Socialist Studies*, 5. No.2, (2009): hlm. 68.

²⁰ V. I. Lenin, *Speech on the Role of the Communist Party*, (Reprinted in Lenin 1972, 1920b), hlm. 50-54.

²¹ V. I. Lenin, *One Step Forward, Two Steps Back: The Crisis in Our Party*, (Reprinted in Lenin 1977: Volume 1, 1904), hlm. 242-421.

²² V. I. Lenin, *Preliminary Draft Resolution of the Tenth Congress of the R.C.P. on Party Unity*, (Reprinted in Lenin 1977: Volume 3, 1921), hlm. 519-22.

²³ Lihat V. I. Lenin, 1904, *One Step Forward...*,

²⁴ V. I. Lenin, *Left-Wing Communism – An Infantile Disorder*, (Reprinted in Lenin 1977: Volume 3, 1920a), hlm. 291-370.

kerja partai harus diintegrasikan dan secara ideologi dikoordinasikan secara langsung dengan proses revolusi anti-kapitalis yang luas dalam skala global yang terorganisir dan disiplin²⁵.

Sementara di sisi yang lain, konsep partai kiri luas (biasanya juga disebut sosial-demokrasi) memiliki perbedaan mendasar dengan partai pelopor. Konsep partai kiri luas ini mulai digunakan pada awal abad ke-19 untuk merujuk konsepsi partai dari Karl Kautsky. Dalam sebuah perdebatan tentang strategi dan taktik dari *German Social Democratic Party* (SPD), Luxemburg menekankan pada pentingnya melakukan pemogokan dan aksi-aksi jalanan seperti yang dilakukan kaum revolusioner di Rusia pada tahun 1905. Dalam pandangan Kautsky hal tersebut adalah “ceroboh”, karena pendekatan dari Luxemburg itu dinilai akan memprovokasi gelombang represi dari aparat negara dan mempersempit ruang gerak kaum kiri²⁶. Kautsky berpendapat. “*Kita hanya akan merusak kuncup semua benih yang menjanjikan yang dipelihara dalam pemilihan Reichstag (parlemen -pen).... kita memprovokasi perjuangan yang akan membawa kita pada kekalahan yang berat Hari ini agitasi kami harus meningkat bukan terhadap pemogokan massa, namun menjelang pemilu Reichstag yang akan datang*”²⁷.

Ajang demokrasi elektoral, bagi kaum sosial demokrasi adalah sebuah strategi untuk merebut kekuasaan, sementara bagi kaum pelopor adalah sebuah taktik. Dalam karyanya *The Road to Power*, Kautsky menulis bahwa:

Partai Sosialis adalah partai revolusioner, tapi bukan partai pembuat revolusi. Kita tahu bahwa tujuan kami hanya dapat dicapai melalui revolusi. Kami juga tahu itu hanya sedikit dalam kekuasaan kami untuk menciptakan revolusi ini dibanding kekuatan lawan kami untuk mencegahnya. Hal itu membuat tidak ada pekerjaan

kami untuk memicu revolusi atau untuk mempersiapkan jalan untuk itu²⁸.

Jika partai pelopor berupaya mempersiapkan dan membuka jalan bagi revolusi sosial, konsep partai kiri luas melihat bahwa revolusi adalah proses yang alami, sesuatu diluar kekuasaan individu atau partai politik untuk mempengaruhinya. Atas dasar itu, strategi elektoral digunakan oleh partai kiri luas untuk meningkatkan keterwakilan di parlemen sembari menunggu datangnya proses revolusi. Mereka mempercayai bahwa parlemen merupakan tuas yang paling kuat untuk digunakan kaum proletariat memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Kautsky²⁹ juga menyatakan ketika partai sosialis telah merebut suara mayoritas dalam pemilu, maka karakter dalam parlemen dapat dirubah dari alat kepentingan kaum borjuis, menjadi alat kepentingan bagi kaum proletar dengan membentuk pemerintahan sosialis. Sementara Lenin berpandangan bahwa perjuangan di jalur pemilu hanya sebagai taktik tidak strategi³⁰.

Dengan strategi parlementarian, maka partai kiri luas memiliki kecenderungan menjadi partai kiri luas (*broad left parties*) yaitu luas dalam hal rekrutmen anggota dan luas secara ideologi walaupun masih dalam batasan ideologi kiri. Studi partai Syriza di Yunani yang menggunakan pendekatan tersebut, memperlihatkan bahwa mereka memiliki anggota yang besar namun tidak ada seleksi dan pendidikan politik yang terstruktur dan ketat, di sisi yang lain ada berbagai aliran kiri dalam partai tersebut dengan tingkat kesadaran politik yang berbeda-beda³¹. Dalam partai kiri luas ini tidak membedakan lapisan kelas pekerja untuk menjadi anggota partai baik yang memiliki

²⁵ V. I. Lenin, *Report on the International Situation and the Fundamental Tasks of the Communist International*, (Reprinted in Lenin 1977: Volume 3, 1920c), hlm. 389-404.

²⁶ D’Arcy, “Strategy, Meta-strategy..”, hlm. 70.

²⁷ Karl Kautsky, *The Mass Strike*, (Reprinted in Goode 1983: 1910), hlm. 71.

²⁸ Karl Kautsky, *The Road to Power*, (-: Humanity Books. 1996), hlm. 24)

²⁹ John H. Kautsky, *Karl Kautsky: Marxism, Revolution & Democracy*, (New Brunswick & London: Transaction Publishers, 1994), hlm. 116.

³⁰ V. I. Lenin, 1920a, *Left-Wing Communism...*,

³¹ Arif Novianto, Lukman Kurniawan & Samodra Wibawa, “Krisis Kapitalisme 2008 dan Bangkitnya Gerakan Kiri: Studi Dinamika Gerakan Partai Syriza di Yunani”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19, No 3, (Maret 2016).

kesadaran revolusioner, yang reformis, maupun yang revisionis. Ini adalah sebuah partai yang sepenuhnya inklusif dan pluralis³².

Kritik yang sering dilontarkan oleh kaum sosial demokrasi (sosdem) terhadap partai pelopor yang Leninis adalah bahwa partai ini bersifat tertutup, anti-demokrasi, dan yang telah menghasilkan Stalinisme. Menurut Shandro³³ konsep partai Leninis itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks historis ketika Lenin membangun gagasan tentang partai pelopor dan perjuangan kelas yaitu ketika rezim Tsar yang otoriter berkuasa. Saat Tsar berkuasa sistem politik tertutup diterapkan dengan kontrol ketat terhadap semua yang dianggap mengancam kekuasaan. Partai politik dilarang, pertemuan terbuka dilarang, aksi demonstrasi dilarang, dan tidak ada pemilu. Keadaan itu membuat pergerakan bawah tanah dan sentralisasi organisasi dilakukan agar menjaga kerahasiaan, dapat kapan saja mengambil keputusan ketika sedang terjadi krisis secara tiba-tiba, dan menjaga keselamatan anggota. Pergerakan terbuka diruang publik tidak memungkinkan untuk dilakukan karena adanya represi, penangkapan dan pembuangan yang dilakukan oleh rezim Tsar. Namun itu berubah ketika rezim Tsar mulai sedikit membuka ruang demokrasi. Pada November 1905, Lenin kemudian menulis sebuah esai yang berjudul *The Reorganization of the Party* dan menulis bahwa, “kondisi dimana partai kita berfungsi telah berubah secara radikal. Kebebasan berorganisasi, berkumpul dan kebebasan pers telah tersedia. Karena itu, yang harus kita lakukan adalah mengorganisir dengan cara baru, metode baru dan garis baru”³⁴.

Mencuatnya Gerakan Kiri pada Masa Orba dan Proses Radikalisasi Gerakan

Tradisi gerakan kiri memiliki pengaruh cukup kuat dan penting dalam pembentukan Indonesia

sebagai bangsa dan sebagai negara yang merdeka. Akan tetapi tradisi dan pergerakan kiri dihancurkan setelah terjadinya peristiwa September 1965³⁵. Sistem politik yang tertutup diterapkan oleh rezim Soeharto yang pada 1967 menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Mekanisme pemilu memang secara rutin dilaksanakan 5 tahun sekali, tapi dalam setiap pemilu tersebut sudah dapat ditebak bahwa pemenangnya adalah Golkar dan Soeharto. Sementara melalui TAP MPR RI No. XXV/MPRS/1966³⁶ ideologi Marxisme dan Leninisme dilarang untuk disebarluaskan. Otoritarianisme berbalut dengan oligarki politik yang diterapkan oleh rezim Orde Baru telah menciptakan berbagai letupan-letupan perlawanan dan krisis politik³⁷.

Sistem politik tertutup yang dijalankan oleh pemerintah dan pemberangusan terhadap potensi gerakan politik dan penghancuran gerakan kiri, tidak lantas meniadakan kemunculan eksponen gerakan kiri. Gerakan mahasiswa diakhir tahun 1980-an menjadi cikal bakal munculnya organisasi kiri dan partai bertipe pelopor di Indonesia³⁸. Para aktivis mahasiswa progresif sekitar tahun 1989-an mulai belajar dari kegagalan dari para generasi sebelumnya paska-1965. Mereka belajar dari gerakan kiri di Filipina yang telah mampu menggulingkan diktator Marcos pada 1980an tentang strategi “live-in” (hidup dan berjuang bersama). Dengan strategi “live-in” inilah para mahasiswa dan aktivis progresif melakukan gerakan perlawanan, seperti yang terjadi di Kedungombo³⁹. Mereka menerapkan strategi ekstra-parlementer seperti

³² Lihat dalam: John Roosa, *Dalil Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008); Olle Tornquist, *Penghancuran PKI* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011).

³³ Untuk penjelasan lebih detail baca David Bouchier dan Vedi R. Hadiz “Indonesian Politics and Society”

³⁴ Michael R. J. Vatikiotis, *Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order*, (London & New York: Routledge, 1998)

³⁵ Lihat: Arif Novianto, “Pergulatan Gerakan Mahasiswa dan Kritik Terhadap Gerakan Moral”, dalam Agus Pramusinto & Yuyun Purbokusumo (eds), *Indonesia Bergerak II: Mozaik Kebijakan Publik 2016*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & MAP UGM, 2016).

³⁶ Lihat: Max Lane, *Unfinished Nation*, (Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe, 2014).

³² Lihat: Jhon Percy, John, “Sebuah Tanggapan untuk Strategi Partai Luas”, dalam *Partai Kiri Luas atau Partai Revolusioner*, (Yogyakarta: Bintang Nusantara, 2013).

³³ A. Shandro, “Consciousness from without: Marxism, Lenin and the Proletariat”. *Science & Society*, 59 (3) (1995), hlm.293.

³⁴ Coen H. Pontoh, “Membaca Lenin di Luar Konteks”, 2010, <http://indoprogess.blogspot.co.id/2010/12/membaca-lenin-di-luar-konteks.html> diakses pada 31 Agustus 2015.

melalui aksi massa dan pengorganisasian di bawah tanah.

Para aktivis mahasiswa yang memiliki tendensi politik kiri pada masa 1992-1993 mulai membentuk organisasi pergerakan, ada Yayasan Maju Bersama (YMB) & Forum Belajar Bebas (FBB) dengan aliran Marxis akademiknya, kemudian muncul organisasi yang berorientasi aksi seperti Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI); dari para pemimpin dan aktivis SMID serta PPBI ini muncul inisiatif membentuk PRD⁴⁰. Sebelumnya SMID dibentuk untuk menentang kebijakan kapitalistik dari Soeharto, dengan berpihak dan berjuang langsung bersama rakyat⁴¹.

Lahirnya dan Dinamika Gerakan PRD: Antara Tahun 1994 - 1998

Pada 02 Mei 1994, sekitar 200 aktivis⁴² dari seluruh Indonesia berkumpul di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta untuk mendeklarasikan pembentukan organisasi politik baru yaitu Persatuan Rakyat Demokratik (PRD). Organisasi tersebut mewadahi mahasiswa, buruh, aktivis, dan petani di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki cita-cita tentang sosialisme. Dalam deklarasi ini dihadiri Adnan Buyung Nasution dari YLBHI, Muhtar Pakpahan ketua serikat buruh SBSI, Dedi Triawan direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Pramodya Ananta Toer (Sastrawan Politik) dan Mulyana Kusuma juga dari YLBHI⁴³. PRD pada waktu itu resmi

dibentuk dengan diketuai oleh Sugeng Bahagijo dan sebagai sekjen yakni Tumpak Sitorus⁴⁴.

Garis politik yang diambil oleh PRD dalam manifesto deklarasinya adalah Sosialisme Demokrasi Kerakyatan. PRD berupaya menjadi oposisi untuk menentang rezim Orde Baru. Kemunculan PRD ini juga merupakan organisasi pertama di Indonesia pasca 1965 dengan ideologi Marxisme⁴⁵. Tokoh LBH Adnan Buyung Nasution dalam sambutannya di acara deklarasi PRD, mengatakan bahwa “sudah lama saya tunggu-tunggu organisasi kerakyatan yang berani memperjuangkan aspirasi rakyat, setelah 30 tahun ini terkungkung dengan berbagai kendala”⁴⁶. Deklarasi PRD ini disambut oleh Dirjen Sospol Depdagri Soetoyo N. K. dengan pernyataannya bahwa “menurut UU no. 3/1985, kegiatan politik di negara ini hanya boleh dilakukan melalui tiga orsospol: PPP, Golkar dan PDI. Kalau PRD bergerak di bidang politik, berarti melanggar hukum, maka akan berhadapan dengan aparat”. Hal senada juga diucapkan oleh Soesilo Soedarman, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) yang langsung mengeluarkan pernyataan: “PRD ilegal, hanya ada tiga partai politik yang diakui oleh pemerintah, PPP, Golkar dan PDI. Pemerintah akan mengambil tindakan”⁴⁷.

PRD walaupun saat itu belum mendeklarasikan diri sebagai partai, mekanisme keorganisasian mereka mengadopsi konsep partai pelopor. *Pertama*, PRD menjadi wadah dari organisasi dan aktivis anti-Kapitalisme dan mengusung cita-cita Sosialisme serta merupakan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 214-215.

⁴¹ Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani*, (Jakarta: Desantara, 2004), hlm. 76.

⁴² Menurut Tempo yang terbit 19 mei 1994 pertemuan tersebut dihadiri 150 aktivis, sedangkan menurut Max Lane dihadiri sekitar 50 orang aktivis.

⁴³ Pada awalnya, PRD singkatan dari Persatuan Rakyat Demokrasi, yang merupakan gagasan dari Danial Indra Kusuma. Dia adalah seorang mahasiswa yang sempat memperdalam ideologi Marxis di Philipina dan Cuba. Pada tahun 1980, Danial mengikuti training gerakan massa di Philipina dan mengadakan hubungan dengan kelompok sosialis di Hongkong. Pada tahun 1989-1990 dia berhasil merekrut Sugeng Bahagijo, Wibby Warow dan Yamin. Pada Mei 1992 telah berhasil direkrut beberapa mahasiswa al. Budiman Sujatmiko dkk. Selain itu, PRD juga berhasil mengajak beberapa mahasiswa yang sebelum keberangkatan mereka ke luar negeri,

terlebih dahulu diberikan pemahaman ideologi. Sumber: <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/01/2388.html>

⁴⁴ Diakses dari Library Ohio, 28/02/2000.

⁴⁵ Walaupun dalam deklarasinya tidak menuliskan kata *marxisme*, *komunisme* ataupun *leninisme*, namun para aktivis didalamnya memiliki pandangan ideologi kiri tersebut dan PRD ini terbentuk dilatarbelakangi oleh pisau analisa gagasan kiri ini. Upaya untuk tidak menuliskan kata *marxisme*, *komunisme* ataupun *leninisme* ini adalah bagian untuk menghindari penghancuran secara langsung dari rezim Orde Baru beserta organisasi akar rumput yang dipeliharanya.

⁴⁶ Tempo, “Orpol Demokrasi?”, 14 Mei 1994, <https://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/05/25/0005.html> diakses pada 12 April 2015.

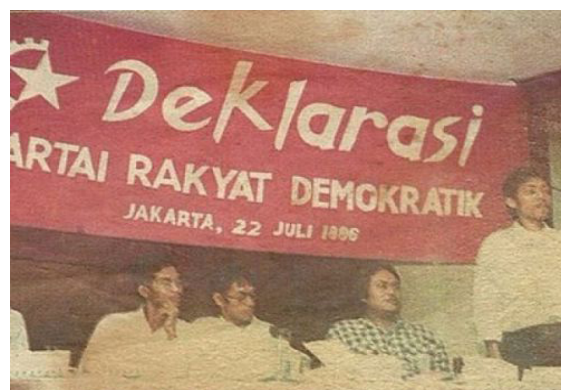
⁴⁷ *Ibid*.

organisasi yang bersifat ketat. Kemunculan PRD ini dapat dilihat sebagai konsolidasi dari berbagai organisasi akar rumput dan para aktivis progresif di tengah terus meningkatnya gerakan perlawanan rakyat. Data dari Yayasan Insan Politika (YIP) menunjukkan lonjakan jumlah aksi protes setelah 1992 (hanya protes mahasiswa, tidak memasukan aksi buruh dan petani) yaitu pada 1993 ada 71 kali aksi dan pada tahun 1994 ada 111 kali aksi⁴⁸. Data tersebut akan lebih besar lagi jika aksi buruh dan petani turut dimasukan serta sumber utamanya tidak hanya dari penelusuran terhadap terbitan Koran di kota-kota besar semata. Dalam keanggotaan, PRD menerapkan mekanisme ketat dikarenakan mereka yang ideologis sesuai garis politik organisasi yang dapat bergabung. Tidak semua orang saat itu, walaupun mereka menentang rezim Soeharto maka bisa menjadi anggota PRD.

Kedua, PRD menerapkan sentralisasi demokrasi. Setelah pendeklarasian PRD, mereka berupaya menjalankan berbagai program politiknya. Namun, tidak bisa berjalan optimal karena menurut dokumen resmi PRD, kurang aktifnya para pengurus (saat itu yang menjabat sebagai Ketua PRD adalah Sugeng Bahagio) dalam mengemban amanat Kongres PRD⁴⁹. Dengan sentralisasi demokrasi maka keputusan PRD bersifat terpusat, ketika kepengurusan kurang aktif maka organisasi menjadi macet. Untuk mengatasi hal itu maka dibentuk Komite Penyelamat Organisasi Persatuan Rakyat Demokratik (KPO-PRD) yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko. Tujuan dibentuknya KPO-PRD ini adalah untuk melakukan pergantian kepengurusan dalam tubuh PRD serta memperbaiki sistem kepengurusan agar dapat mencapai program dari PRD. Setelah kepengurusan lama tidak bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban maka tugas dari KPO-PRD berakhir, kemudian dibentuk Presidium Sementara Persatuan Rakyat Demokratik (PS-PRD). Tugas dari PS-PRD ini adalah untuk menjalankan kongres secepat mungkin untuk memilih kepengurusan harian baru sambil tetap menjalankan program dan strategi atau taktik yang menjadi amanat

kongres⁵⁰. Dalam sentralisasi demokrasi dari PRD, garis komando dilakukan secara terpusat, keputusan partai wajib dijalankan oleh semua anggota sampai tingkat paling bawah. Akan tetapi mereka dapat untuk tidak menjalankan keputusan terpusat dengan syarat membuat *thesis* yang berisi pertimbangan pilihan menjadi oposisi dan membawanya ke kongres.

PRD pada Mei 1996 mengadakan kongres pertama di Sleman, Yogyakarta. Kongres pertama mengambil beberapa keputusan penting dalam hal proram-program, strategi-taktik perjuangan, organisasi, AD-ART partai, slogan, logo dan memilih pengurus pusat. Semenjak itu Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) mendeklarasikan diri menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD)⁵¹. Secara resmi manifesto dari PRD dibacakan sebagai Deklarasi Partai Rakyat Demokratik di gedung YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) pada tanggal 22 Juli 1996. Adapun ketua dari PRD ini adalah Budiman Sudjatmiko dan Sekretaris Jendralnya Petrus Hariyanto.



Gambar 1. Foto Deklarasi Partai Rakyat Demokratik
Sumber: Tempo Online

Ketiga, PRD terlibat dalam proses *live-in* dan pergerakan untuk berpartisipasi, menggugah kesadaran dan memberi kepeloporan dalam perlawanan terhadap penguasa bersama masyarakat luas. Dalam pergerakannya, PRD menggunakan dua strategi utama yaitu “strategi atas” dimaksudkan sebagai strategi berbicara

⁴⁸ Max Lane, *Unfinished Nation...*, hlm. 223.

⁴⁹ Miftahudin, *Radikalisasi Pemuda...*, hlm. 82.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/01/2388.html>

dengan massa seluas-luasnya melalui berbagai media massa seperti TV, Radio, Koran, dan Media jejaring sosial. Tujuan dari “strategi atas” ini adalah agar cita-cita politik mereka dapat tersebar luas dan untuk mendapatkan dukungan rakyat. Strategi kedua adalah “strategi bawah” yang dimaksud adalah pergerakan melalui pengorganisasian, konsolidasi dan mobilisasi massa⁵². “Strategi bawah” menjadi bagian dari politik keseharian para aktivis PRD, sementara “strategi atas” lebih digunakan dengan cara memobilisasi massa untuk mendapatkan peliputan media dan salah satunya adalah pembentukan aliansi taktis untuk mendukung Megawati yang berupaya disingkirkan oleh Rezim Soeharto dari kursi kepemimpinan PDI.

Ketidakmampuan rezim Soeharto untuk kembali mengontrol serta mengendalikan PDI, karena naiknya Megawati sebagai pemimpin PDI telah membuat rezim Soeharto menempuh berbagai cara untuk mencongkel Megawati. Itu karena Megawati dianggap dapat mengancam masa depan pemerintahan Orde Baru. Kehadiran Megawati dalam dinamika politik di PDI sebagaimana menurut Edward Aspinall⁵³ telah mampu untuk menarik basis massa PNI Lama untuk merapat ke PDI. Berbagai unsur PNI Lama yang masih terikat dengan Soekarnoisme ditambah para rakyat kecil, para pemuda pengangguran, buruh informal perkotaan dan masyarakat pedesaan yang berpandangan Soekarnoisme menjadi basis massa dari PDI ini karena pengaruh sosok Megawati.

Pada Juni 1996, pemerintah Orde Baru memutuskan hanya mengakui kongres PDI yang diselenggarakan oleh faksi yang anti-Megawati dan pro-rezim. Dengan demikian, pengakuan hukum bagi Megawati sebagai ketua PDI dicabut oleh pemerintah Orba. Keadaan tersebut membuat terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh Megawati bersama para pendukungnya⁵⁴. Terjadinya goncangan di level elit politik pemerintahan, membuat PRD mengambil posisi untuk mendukung PDI Megawati. Itu

karena dipengaruhi dua hal, *pertama* untuk membuka ruang demokrasi yaitu kebebasan berserikat, berkumpul dan berpartai. *Kedua*, untuk semakin mendesak rezim Soeharto. Berbagai aksi gabungan antara PDI dan PRD yang membuat kedua bendera partai tersebut menjadi mendapatkan perhatian dari rakyat, sebagaimana menurut Max Lane dilakukan di berbagai tempat:

Aksi protes menentang penolakan Soeharto terhadap kepemimpinan Megawati mulai dipicu di Semarang pada 14 Juni. Kemudian diikuti aksi-aksi di Surabaya dan Yogyakarta pada 17 Juni; di Salatiga pada 18 Juni; di Jakarta pada 18 Juni yang diikuti sekitar 4.000 orang. Kemudian menjadi aksi terbesar 15.000 orang pada 20 Juni di Jakarta juga hingga terjadi bentrokan dengan tentara sekitar 70 orang terluka berat dan 50 orang ditangkap. Di Yogyakarta, 25 Juni terjadi demonstrasi yang terdiri dari 7.000 orang yang berhasil menerobos barikade tentara di luar kampus UGM untuk menuju ke DPRD-Yogyakarta. Di Jakarta pada 28 Juni, 3.000 orang berkumpul di DPR RI untuk mendukung Megawati dan di Jakarta pula 12 Juli, 5.000 orang berkumpul di gedung Proklamasi.

Pada 18 Juni, PRD mengorganisasi 2.000 buruh dari PT Indo Shoes yang berbasis diluar Jakarta untuk mogok dan datang ke Jakarta berkumpul diluar gedung DPR RI, dimana 3.000 mahasiswa dan buruh lainnya ikut bergabung. Pada 19 Juli, antara 10.000 hingga 20.000 buruh dari 10 pabrik di daerah Surabaya mogok yang diorganisasi dibawah bendera PRD dan PPBI yang mendistribusikan ribuan selebaran kepada buruh dengan tuntutan-tuntutan: hentikan campur tangan tentara terhadap buruh; hentikan dwifungsi ABRI; mencalonkan Megawati sebagai presiden. Aksi tersebut membuat terjadinya bentrokan dengan tentara hingga beberapa terluka dan lebih dari 20 orang ditahan, termasuk pemimpin PPBI Dita Sari dan Coen Pontoh⁵⁵.

Puncak dari peristiwa konfrontasi antara rezim Soeharto dengan Megawati yang didukung oleh eksponen gerakan kiri adalah pada 27 Juli 1996. Pada hari itu terjadi peristiwa yang disebut Kudatuli yaitu penyerbuan terhadap kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Para anggota

⁵² Max Lane, *Unfinished Nation...*, hlm. 456-458.

⁵³ Lihat: Edward Aspinall, *Opposing Suharto: Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia*, (New York: Stanford University Press, 2005).

⁵⁴ Max Lane, *Unfinished Nation...*, hlm. 243.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 244-245.

PDI yang mendukung Megawati menolak untuk keluar dari gedung DPP PDI sebagaimana yang diintruksikan oleh Pemerintah Soeharto. Sehingga terjadi penyerbuan yang dilakukan oleh tentara dan anggota PDI pro-Soerjadi yang sebelumnya mengepung kantor DPP PDI tersebut⁵⁶. Solidaritas dan gerakan perlawanan dari masyarakat dan para aktivis berdatangan untuk membantu anggota PDI pendukung Megawati yang tengah berhadapan dengan aparat pemerintahan. Hingga akhirnya terjadi bentrokan dan kerusuhan massa. Peristiwa tersebut seperti apa yang terjadi pada peristiwa Malari. Dalam peristiwa 27 Juli 1996 itu (juga disebut sebagai peristiwa Kudatuli), terjadi pengrusakan terhadap 56 gedung, lebih dari 200 orang ditangkap dan 4 orang terbunuh (menurut data resmi)⁵⁷.

Setelah peristiwa Kudatuli, PRD dituduh oleh aparat menjadi motor penggerak. Tak ayal, kader dan simpatisan PRD segera diburu untuk ditangkap. Hal ini tidak mengherankan, mengingat aktivis-aktivis PRD termasuk diantara aktor-aktor prodemokrasi paling radikal dan vocal⁵⁸. Pemerintah kemudian mengkampanyekan propagandanya dengan mencap PRD sebagai komunis dan versi baru PKI. Tigapuluh pemimpin dan anggota PRD ditangkap dan dipenjara. Budiman Sudjatmiko sebagai ketua umum, divonis 13 tahun penjara, sedangkan lainnya mendapat vonis beragam, antara 1,5 tahun hingga 12 tahun⁵⁹. PRD akhirnya dipaksa untuk semakin bergerak di “bawah tanah”, termasuk karena keluarnya SK Mendagri yang menyatakan PRD sebagai partai terlarang. Sementara PRD yang merupakan partai yang mempromosikan aksi dan mobilisasi massa diburu, aksi-aksi protes itu sendiri terus meningkat, namun aksi yang diprakarsai PRD terus menurun untuk beberapa bulan dan mulai

melancarkan aksi mereka sendiri dengan bendera lain dibeberapa kota pada awal 1997⁶⁰.

Ketika masa kampanye di Pemilu 1997, para aktivis gerakan kiri seperti PRD terlibat dalam pengorganisasian dan aksi-aksi mendukung Megawati serta menentang pemerintah. Isi tuntutan tersebut berupa: turunkan Soeharto dan lima undang-undang paket politik; cabut dwifungsi ABRI; hapuskan korupsi dan konglomerat; selidiki kekayaan presiden serta keluarganya dan para menteri atau pejabat lainnya; dan turunkan harga. Aktivis PRD sebagaimana menurut Max Lane⁶¹ mengatakan bahwa mereka mampu menyebarkan 600.000 selebaran dengan bantuan sukarelawan dari orang-orang yang bergabung dengan mobilisasi massa.

Tabel. 1. Perolehan Suara Pemilihan Umum 1997

No Urut	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	25340028	89
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	84187907	325
3.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	3463225	11

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Proses pemilihan umum yang dilakukan pada 29 Mei 1997 menunjukkan bahwa Golkar menjadi pemenang dengan perolehan 84.187.907 (70%) suara (lihat tabel 1). Hal tersebut sudah dapat diprediksi sebelumnya. Perolehan PDI menjadi yang paling rendah itu karena seruan dari Megawati bersama para aktivis untuk memboikot Pemilu. PRD dalam pemilu 1997 tersebut juga menyerukan untuk memboikot pemilu dan menolak hasil pemilu.

Krisis Ekonomi Menuju Krisis Politik: Badai Pendorong Jatuhnya Soeharto

Krisis ekonomi di Indonesia pada Juli 1997 dimulai dari badai krisis mata uang Baht yang terjadi di Thailand semenjak Mei 1997. Segera saja nilai rupiah terjun bebas, terdevaluasi dari Rp. 2400 per satu dollar AS di awal Juli 1997 menjadi Rp. 3000 empat bulan kemudian dan

⁵⁶ Jakarta Post, “The Riots that Saw Megawati Rise to the Top”, 27 Juli 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/27/the-riots-saw-megawati-rise-top.html> diakses pada 13 Agustus 2015.

⁵⁷ Darmanto Jatman, *Membongkar Misteri Sabtu Kelabu 27 Juli 1996*, (---: Lubuk Raya, 2011).

⁵⁸ Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 117.

⁵⁹ Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda...*, hlm. 85.

⁶⁰ Max Lane, *Unfinished Nation...*, hlm. 248.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 223.

mendekati Rp. 16.000 pada Januari 1998⁶². Untuk mengatasi krisis ekonomi, rezim Soeharto yang juga tengah dilanda krisis politik melakukan nota kesepahaman (*Letter of Intent*) dengan IMF (International Monetary Fund)⁶³. Nota kesepahaman baru tersebut tidak mampu menstabilisasi perekonomian dan semakin membuat gerakan aksi massa meningkat sebagai akibat dari depresi ekonomi dan naiknya harga-harga.

Rezim Soeharto walaupun melakukan pelarangan dan pemburuan terhadap anggota PRD, namun mereka menggunakan bendera lain untuk memperbesar gelombang aksi massa. Strategi kepeloporan tetap dilakukan untuk turut terlibat dalam memperluas kesadaran massa. Kegagalan membungkam aktivisme PRD ini menurut Max Lane⁶⁴ dipengaruhi oleh dua hal, *pertama* organisasi bawah tanah' PRD masih efektif dan orang-orang penting lainnya yang dicari rezim tetap dapat dilindungi dengan baik. *Kedua*, dan yang lebih penting, seluruh gerakan telah berkembang melampaui PRD karena telah memiliki momentumnya untuk mobilisasi.

Akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari kursi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Habibie disumpah untuk menggantikannya sebagai Presiden. Mundurnya Soeharto ini akibat tekanan yang kuat dari aksi massa yang membuat pecahnya konsolidasi elit sehingga para kroni-kroni Soeharto mulai meninggalkannya dan berbalik arah menekannya untuk mundur⁶⁵.

Menuntut Melangkah Lebih Jauh:

Era Transisi 1998-1999

Lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaannya tidak lantas membuat gerakan politik rakyat puas, mereka berupaya terus menekan pemerintah

untuk menjalankan tuntutan-tuntutannya yang lebih besar. Agenda reformasi total yang dipopulerkan oleh PRD dalam propagandanya adalah cabut semua UU politik yang represif dan hentikan dwifungsi ABRI serta tuntutan untuk menghentikan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). PRD menggunakan gerakan ekstra-parlementer dengan mendorong mobilisasi massa dan aksi protes dengan tujuan merubah sistem politik Indonesia dari yang otoriter menjadi deliberatif. Strategi itu dilakukan juga untuk mendorong proses revolusi bukan hanya sekedar reformasi⁶⁶.

Naiknya Habibie sebagai Presiden menggantikan Soeharto ditentang oleh PRD dan gerakan rakyat lainnya. Presiden Habibie dinilai masih bagian dari regim Orde Baru. Menghadapi tekanan kuat, Habibie yang didukung oleh lingkaran intelektual dan mantan aktivis dengan cepat mencoba mengeluarkan serangkaian kebijakan perubahan untuk memenuhi harapan Reformasi. Antara lain mencabut Dwi Fungsi ABRI, meliberalkan undang-undang kebebasan berorganisasi, mempercepat Pemilu dan Sidang Umum Istimewa MPR RI. Menyikapi proses pergantian Presiden dan upaya Reformasi yang dijalankan oleh Presiden Habibie, memunculkan dua garis pemikiran secara umum. *Pertama*, lingkaran elit konservatif yang masih dalam *enclave* Orde Baru dan masyarakat yang cenderung mulai bergerak ketika sudah detik-detik lengsernya Soeharto dan rakyat yang apatis. Kelompok tersebut memilih untuk mendukung upaya reformasi Presiden Habibie. Sedangkan yang *kedua*, kelompok radikal yang mempromosikan gerakan aksi massa dan mogok sejak akhir 1980an. Kelompok yang terdiri dari lingkaran politik PRD, Komrad (Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi), Forkot (Forum Kota) dan para buruh serta kaum miskin kota mendorong adanya reformasi total dengan menekankan pembentukan komite rakyat atau dewan rakyat⁶⁷.

PRD terus mendorong gerakan ekstra-parlementer dengan menekankan pada struktur gerakan dari bawah. Mereka berupaya merombak

⁶² Eric Hieriej, *Globalisasi, Kapitalisme dan Perlawanan*, (Yogyakarta: Institute of International Studies, 2012), hlm. 147.

⁶³ Lihat: Stefan Eklof, *Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto 1996-98*. (Copenhagen: NIAS Publishing, 1999).

⁶⁴ Lihat: Max Lane, *Unfinish Nation...*,

⁶⁵ Lihat: Edward Aspinall, "Agensi dan Kepentingan Massa dalam Masa Transisi dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", *Prisma*, Vol. 33 No. 1 (2014).

⁶⁶ Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda...*,

⁶⁷ Arif Novianto, "Pergulatan Gerakan Mahasiswa...", hlm. 215-217

negara dimana rakyat kemudian yang membangun kekuasaan negara dengan pembentukan komite-komite rakyat. Eskalasi gerakan mobilisasi massa paska jatuhnya Soeharto mengalami penurunan dan hanya terjadi di kota-kota besar. Kelompok pro reformasi yang mempercayai perbaikan melalui pergantian tampuk pimpinan dari Soeharto ke Habibie menentang upaya kelompok progresif. Gagasan dewan rakyat dipandang oleh Amien Rais (tokoh pro reformasi) sebagai politik *kiri*, dengan memperingatkan orang-orang bahwa gagasan tersebut adalah gagasan yang diambil dari ideologi komunisme. Lebih jauh Amien Rais mengatakan bahwa:

Itu berbahaya sekali, karena orang disuruh tak percaya kepada proses demokrasi, pemilihan dilecehkan, lantas parpol-parpol mungkin tak diperlukan lagi dan orang hanya mengandalkan kekuatan massa, kekuatan otot⁶⁸.

Pertarungan gagasan dan gerakan tentang akan dibawa kemana negara Indonesia pada waktu itu berlangsung di tengah badai krisis ekonomi dan krisis politik. Kelompok gerakan kiri terus mendorong mobilisasi massa dengan gerakan ekstra-parlementernya. Upaya demobilisasi aksi massa terjadi menjelang dilaksanakannya Sidang Umum Istimewa MPR pada November 1998. Hal itu melalui deklarasi Ciganjur yang dilakukan oleh Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Sultan Hamengkubuwono pada 10 November 1998 di rumah Abdurrahman Wahid, dengan isi⁶⁹:

1. Segera dilaksanakannya pemilu yang jujur dan adil yang dilaksanakan oleh pelaksana independen, dimana panitia pemilu terdiri atas peserta pemilu, dan diawasi oleh tim independen. Pemilu merupakan jalan demokratis untuk mengakhiri pemerintahan transisi yang dipimpin oleh BJ Habibie, sekaligus menjadi cara untuk menetapkan pemerintahan yang baru secara *legitimate*. Selambat-lambatnya dalam 3 bulan setelah pemilu pada bulan Mei 1999 berlangsung, pemerintahan baru

tersebut harus sudah terbentuk melalui Sidang Umum MPR RI.

2. Penghapusan dwifungsi ABRI secara bertahap, paling lama 6 (enam) tahun dari tanggal pernyataan ini dibacakan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

Deklarasi Ciganjur ini telah mempersempit ruang bagi gerakan ekstra-parlementer dengan mengedepankan proses pergantian pemimpin melalui Pemilu. PRD bersama ribuan mahasiswa tetap berupaya melangkah lebih jauh mendorong agenda reformasi total memanfaatkan momentum politik yang ada. Momentum politik bagi terus berlangsungnya aksi massa tetap terbuka, namun dengan adanya deklarasi Ciganjur ini membuat aksi massa menjadi berkurang. Itu karena sebagian besar gerakan yang menuntut Soeharto turun lebih karena pertimbangan pragmatis dibanding ideologis. Gerakan kiri tidak mampu membentuk dewan rakyat dalam menjalankan agenda perubahan dalam kekuasaan negara.

Ketidakmampuan gerakan kiri mendorong reformasi total dan menjalankan dewan rakyat ini dipengaruhi oleh dua hal, *pertama* politik massa mengambang yang dijalankan oleh rezim Orde Baru telah membuat kurangnya kesadaran politik rakyat secara luas dan terputusnya ingatan sejarah rakyat untuk menuntaskan revolusi nasional yang dibentuk sendiri oleh gerakan massa. Hal tersebut membuat momentum politik sebagai akibat krisis politik dan krisis ekonomi tidak berhasil dimaksimalkan karena gerakan tidak mampu meluas dan gerakan diluar lingkaran PRD terjebak pada gerakan spontan. *Kedua* kepeloporan yang berupaya diinisiasi oleh PRD dihadapkan dengan sikap anti kiri dari massa mengambang dan hadangan para elit pro reformasi seperti yang terjadi dalam deklarasi Ciganjur. Kondisi itu menjadikan upaya mencapai perubahan revolusioner hanya digerakan oleh sedikit orang dan mayoritas mengikuti alur reformasi.

⁶⁸ Max Lane, *Unfinished Nation*., hlm. 300.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 302.

Dari Ekstra-Parlementer ke Parlementer

Ketidakmampuan mendorong dewan rakyat dan dekatnya ajang kontestasi politik pemilu pada Mei 1999 membawa PRD berada dalam kontradiksi. Apakah tetap menjalankan gerakan ekstra-parlementer atau memutuskan untuk mengikuti gerakan parlementer di Pemilu 1999 atau memboikot pemilu tersebut. Dalam internal PRD terjadi perpecahan dalam memutuskan sikap PRD dalam Pemilu 1999. Hingga akhirnya PRD memutuskan untuk terlibat dalam pemilu 1999 dan perdebatan di internal PRD pun berlanjut tentang slogan dan strategi yang akan diusung.



Gambar 2. Sampul Buku Kecil “Demi Demokrasi PRD Menolak Takluk”

Sumber: Tempo Online

Dalam mengarungi pemilu 1999, PRD akhirnya memutuskan semboyan mereka “Coblos PRD atau Boikot Pemilu Bersama Mahasiswa dan Rakyat”. Semboyan itu menunjukkan adanya kebimbangan dari PRD untuk mengikuti jalur parlementer atau ekstra-parlementer di tengah sistem politik yang mulai terbuka. PRD menggunakan dana kampanye mereka yang sebesar 86 juta untuk mendanai pencetakan 100.000 tiras buku kecil dengan judul “Demi

Demokrasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk”⁷⁰. Dalam buku itu berisi program-program dan pandangan politik partai. Sementara pada tahun 1999, Indonesia memiliki 90 juta pemilih.

Strategi kampanye PRD pada 1999 berbeda dengan 47 partai lain yang mengikuti pemilu 1999. Partai lain secara umum membuka seluas-luasnya pendaftaran untuk menjadi anggota partai, melakukan kampanye dengan cara beriklan di berbagai media, mencetak kaos gambar partai, stiker, spanduk, bendera dan juga yang lain. Strategi kampanye itu untuk mengenalkan partai kepada masyarakat yang hampir 30 tahun hanya mengenal 3 partai saja disetiap ajang pemilu. Sedangkan PRD tetap menjalankan keanggotaan partai secara ketat dan tertutup, mereka yang memenuhi prasyarat kepeloporan yang bisa menjadi anggota partai. Tidak semua orang bisa menjadi anggota PRD. Strategi untuk mengenalkan partai, program serta menarik simpati dari rakyat untuk memilih PRD turut dilakukan dengan mengangkat simpati masyarakat terhadap Budiman Sudjatmiko, tokoh PRD yang ditangkap rezim Orde Baru pada 1996 dan dibebaskan setelah Reformasi 1998.

Setelah melalui tahap kampanye dan penghitungan suara, hasil dari pemilu 1999 tidak satupun PRD menempatkan wakil mereka di parlemen. Perolehan suara PRD hanya 78.730 suara dari 105,7 juta suara sah di pemilu itu. Abdurrahman Wahid dengan PKB dan Amien Rais dengan PAN yang merupakan partai baru dalam pemilu 1999 serta Megawati dengan kendaraan politik PDIP berhasil masuk 4 besar, sedangkan satunya adalah Golkar yang masih memiliki basis kuat di birokrasi serta dengan pendanaan yang besar. Tiga tokoh dalam deklarasi Ciganjur yang mempromosikan politik demobilisasi berhasil menarik simpati dari rakyat untuk memilih partai yang mereka usung. Hal berbeda dialami oleh PRD, dengan kebimbangannya ketika dihadapkan dengan sistem politik terbuka mereka gagal dalam gerakan parlementer.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 453.

Kegagalan PRD dalam pemilu 1999 ini, menurut Budiman Sudjatmiko⁷¹ (2014) dikarenakan oleh:

PRD disiapkan untuk menghadapi situasi perang manuver 'bawah tanah'. Para kader partai dibekali memiliki kemampuan operasi propaganda dan pengorganisasian rahasia. Penggalangan ini diharapkan akan menyediakan basis massa militan untuk konflik terbuka (aksi massa) terhadap kekuatan kediktatoran. PRD tidak didesain untuk menghadapi perang posisi. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menguasai kekuatan politik formal. (hal. 87)

Terbentuknya PRD dilatarbelakangi oleh aktivis-aktivis gerakan dan mahasiswa yang sejak awal menekankan gerakan politik ekstraparlementer. Sistem kaderisasi PRD lebih bersifat ketat dan tertutup, karena dipengaruhi ancaman dan represi dari pemerintah yang berkuasa (garis politik partai pelopor). Disaat partai ini dimasukkan dalam kategori partai terlarang oleh pemerintahan Orba dan para pimpinan partai ditangkapi, mereka kemudian bergerak dalam bawah tanah. Gerakan yang mereka lakukan lebih menitik beratkan pada daerah-daerah konflik untuk membangun perlawanannya. Depolitisasi kehidupan rakyat membuat PRD mendorong meluasnya kesadaran revolusioner di tengah gerakan rakyat. Ketika kekuasaan *authoritarian* Soeharto jatuh dan berganti kekuasaan yang lebih terbuka, PRD tetap menjalankan strategi kepeloporan.

Kekalahan PRD pada pemilu 1999 ini dipengaruhi oleh dua hal, *pertama* PRD tidak disiapkan sebagai partai yang mengarungi demokrasi elektoral formal. Aksi kolektif yang dirumuskan dan dipraktekkan oleh PRD melalui mobilisasi aksi massa memiliki keunggulan dalam struktur peluang politik tertutup yang menghasilkan respon represif. Sebaliknya partai tipe kepeloporan ini lemah ketika mengikuti Pemilu dalam struktur politik terbuka, apalagi di tengah situasi kesadaran politik yang terdepolitisasi.

Kedua, masih menguatnya massa mengambang bentukan Soeharto. Rezim

Soeharto menciptakan massa mengambang untuk memotong memori pergerakan rakyat yang telah terbentuk sejak 1912-1965. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi buta politik dan kehilangan akar sejarah mereka. PRD adalah gerakan yang mencoba mengaitkan akar sejarah ini, sehingga PRD mempromosikan tradisi bergerak, berpolitik, berpartai, berserikat dan membuka ruang demokrasi. Gerakan yang dibangun PRD tersebut tidak mendapatkan respon positif dari rakyat setelah jatuhnya musuh bersama mereka yaitu Soeharto. Upaya PRD untuk menghancurkan perluasan basis "massa mengambang" memang berhasil, tapi cengkeramnya sudah begitu menguat. Itu membuat PRD tidak mendapatkan suara pada pemilu 1999, karena rakyat tidak lagi melihat program dan tujuan partai tapi lebih ke personalitas pemimpin dan politik transaksional. Selain itu imajinasi ketakutan yang diberikan selama rezim Soeharto berkuasa cukup mempengaruhi massa mengambang ini, sehingga ketika PRD dipropagandakan oleh lawan politiknya sebagai partai komunis, telah mampu membuat massa mengambang ini memusuhi PRD.

Di tengah gejolak krisis politik dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak 1996 sampai 1999 tidak mampu membuat PRD (dengan program-program sosialisnya) merebut hati rakyat dalam pemilu 1999. Hal tersebut cukup berbeda dengan apa yang terjadi di Yunani dan Perancis pada pemilu yang diselenggarakan di negara tersebut setelah krisis ekonomi 2008. Partai politik yang merepresentasikan gerakan kiri seperti Syriza di Yunani mampu berbicara banyak dalam pemilu disana, bahkan pada 2015 partai ini berhasil menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi dan menguasai parlemen Yunani⁷².

⁷¹ Lihat: Budiman Sudjatmiko, *Anak-anak Revolusi: Buku 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

⁷² Penjelasan secara lebih mendalam tentang krisis ekonomi 2008 di Eropa dan dinamika gerakan kiri di Yunani, dapat disimak dalam penelitian: Arif Novianto, Lukman Kurniawan & Samodra Wibawa, "Krisis Kapitalisme dan Dinamika Gerakan Kiri dalam Pemilu: Studi Kasus di Indonesia dan Yunani", Pusat Studi Jerman UGM (2015).

PRD Pasca Pemilu 1999 dan Ajang Pemilu Elektoral

Kekalahan PRD dalam pemilu 1999, membuat terjadinya perpecahan ditubuh PRD. Perdebatan yang muncul adalah tentang akan bergerak dalam gerakan ekstra-parlementer atau parlementer partai politik partai ini. Antara 2000 – 2007, terjadi degenerasi partai atau keluarnya generasi awal yang terlibat dalam PRD. Degenerasi ini dipengaruhi oleh dua hal⁷³. *Pertama*, hilangnya beberapa kader utama karena mereka lebih fokus pada aktivisme kiri demokratik non-partai, seperti menulis, menjadi jurnalis atau terlibat dalam LSM. Perpisahan secara berkelompok mulai terjadi pada tahun 2000 yang dipimpin oleh Coen Pontoh (sekarang editor IndoPROGRESS), Mugiyanto, dan Henri Kwok yang memisahkan diri dan membentuk Partai Demokratik Sosialis (PDS). Tak berselang lama setelah berdiri PDS ini pecah, kemudian beberapa orang didalamnya membentuk Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP). Budiman Sudjatmiko juru bicara PRD juga keluar dari partai dan melanjutkan kuliah ke Inggris, setelah kembali ke Indonesia dia bergabung dengan PDIP.

Kedua, distorsi terhadap apa yang disebut PRD sebagai “strategi atas”⁷⁴. Melalui strategi atas PRD berupaya memperluas jangkauannya. Pada periode 1994 – 1998, strategi atas ini dijalankan dengan memobilisasi massa petani, buruh dan mahasiswa untuk mendapatkan liputan media. Begitupula aliansi taktis dengan Megawati untuk mempertahankan demokrasi pada 1996 ketika peristiwa Kuda Tuli dan pada pemilu 1999 ketika PDIP memperoleh suara terbanyak akan tetapi tidak menjadi Presiden. Setelah Megawati menjadi Presiden dan melakukan berbagai kebijakan neoliberal, PRD mendorong koalisi oposisi hingga terbentuk Koalisi Nasional (KN) pada 2003 yang terdiri dari 23 organisasi yang terlibat didalamnya. Namun KN ini tidak bertahan lama, gerakan mobilisasi yang dilakukan terbilang kecil dan tak

mampu mendorong perubahan besar. Kenyataan tersebut membuat adanya distorsi dalam strategi atas ini. Hingga akhirnya pemilu 2004 semakin dekat dan PRD mencoba mencari cara untuk ikut kembali dalam pemilu 2004 ini.

Peraturan baru tentang batasan *electoral threshold* dan persyaratan lain bagi partai untuk mengikuti pemilu 2004, membuat partai-partai kecil seperti PRD sangat kesulitan untuk memenuhi persyaratan. Terkait permasalahan tersebut PRD memutuskan untuk membentuk partai elektoral secara terpisah, yaitu Partai Persatuan Oposisi Rakyat (Popor) untuk terlibat dalam pemilu. Namun karena persiapan yang begitu singkat yaitu hanya sejak 2003 padahal pemilu dilakukan pada 2004, membuat Popor kesulitan memenuhi kualifikasi persyaratan pendaftaran pemilu⁷⁵.

Kegagalan mengikuti pemilu 2004, membuat PRD jauh-jauh hari melakukan persiapan untuk mengikuti pemilu 2009. Kemudian PRD membentuk partai sayap-kiri untuk mengarungi pemilu elektoral yaitu Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) pada 2006. Budaya polemik perdebatan dalam tubuh PRD ini terjadi tentang strategi yang akan dilakukan Papernas. Hingga terjadi perpecahan di tubuh Papernas ini menjadi dua kubu, yaitu Dania Indrakusuma yang menekankan pada strategi progresif aksi massa dan Dita Sari yang menitikberatkan pada konsentrasi para kader untuk mencari kontak ditingkat kabupaten dan kota, sehingga menurut Dita Sari tidak seharusnya energi kader dicurahkan untuk mobilisasi kampanye⁷⁶. Kontradiksi dalam tubuh Papernas memuncak ketika sekali lagi mereka dihadapkan dengan peraturan baru yang semakin memberatkan partai kecil untuk mengikuti pemilu. Pada 2007 terjadi pertemuan para pemimpin partai, Dita Sari bersama para pendukungnya mengajukan proposal agar Papernas dapat mengikuti pemilu 2009 yaitu menggabungkan Papernas dengan partai yang sudah pasti lolos yaitu Partai Bintang Reformasi (PBR).

⁷³ Max Lane, *Unfinished Nation...*, hlm. 454-458.

⁷⁴ “strategi atas” dimaksudkan sebagai berbicara dengan massa seluas-luasnya melalui berbagai media massa seperti TV, Radio, Koran, dan Media jejaring sosial untuk mendapatkan dukungan rakyat. Sedangkan “strategi bawah” yang dimaksud adalah melalui pengorganisasian, konsolidasi dan mobilisasi massa.

⁷⁵ *Ibid*, 461.

⁷⁶ *Ibid*.

Meski terjadi polemik pro-kontra, proposal tersebut pada akhirnya diterima oleh suara mayoritas. Dipimpin oleh Dita Sari, mereka berdalih bahwa itu adalah cara agar mereka bisa berbicara pada massa secara luas demi menyebarluaskan program radikalnya (walaupun kemudian itu melunakan substansi politik mereka)⁷⁷. Hal tersebut membuat sepertiga anggota ideologis PRD meninggalkan partai, karena PBR dianggap bukanlah partai kiri atau partai progresif dan PBR adalah partai anti-kiri (deideologi). Kemudian sebagian kader yang keluar membentuk KPRM-PRD (Komite Penyelamat Rakyat Miskin – PRD) yang pada 2010 berubah menjadi Partai Pembebasan Rakyat (PPR)⁷⁸.

Sejak ditinggalkan kader-kader ideologis, PRD mengalami masa degenerasi dan deideologi. Hal tersebut semakin tampak setelah pemilu 2009, dimana ideologi PRD menjadi nasionalis dengan dilandaskan pada Soekarnoisme. Itu dapat terlihat dari website resmi PRD yaitu Berdikari Online. Pada tahun 2010 melalui kongres ke-7, mengganti ideologi mereka dari “Sosial Demokrasi Kerakyatan” menjadi “Pancasila”. Mereka juga menggunakan pergerakan di pemilu parlementer atau jalur elektoral sebagai sebuah strategi. Hal itu juga merubah sistem rekrutmen anggota partai yang lebih bersifat terbuka dan luas (Lihat Leaflet PRD di prd.or.id). PRD semakin memperlihatkan perubahan dalam bentuk partai mereka, yaitu dari partai pelopor menjadi partai kiri luas.

Ekspresi gerakan kiri sejak kejatuhan Soeharto sampai saat ini memang mengalami peningkatan, namun mereka terpecah dalam berbagai organisasi. Ada yang dari pecahan-pecahan PRD atau dari proses rekomposisi dan rekonsolidasi serta regenerasi aktivis-aktivis kiri baru. Seperti PPR yang kemudian pecah dan muncul Politik Rakyat (PR). Pada 2011 terbentuk Komite Penyelamat Organisasi – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPO-PRP) yang merupakan perpecahan dari PRP.

⁷⁷ Max Lane, “Demagogi Anti-Neoliberal Gagal Menarik Minat dalam Pemilihan Umum Indonesia”, 04 September, <https://koranpembebasan.wordpress.com/2009/09/04/demagogi-anti-neoliberal-gagal-menarik-minat-dalam-pemilihan-umum-indonesia/> diakses pada 12 Agustus 2015.

⁷⁸ *Ibid.*

Penutup

Terbentuknya PRD yang merupakan aliansi gerakan kiri progresif di tahun 1994 merupakan upaya untuk membangun partai pelopor dalam relasi kuasa *authoritarian* di era Soeharto. PRD lahir di tengah meningkatnya radikalisasi gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat dalam menentang rezim Soeharto. Dalam sistem politik *authoritarian*, PRD menjalankan pergerakan ekstra-parlementer. Mereka membangun jejaring pergerakan bersama rakyat, menginisiasi aliansi-aliansi perlawanan, berupaya menyebarluaskan kesadaran revolusioner pada rakyat kelas bawah, dan melakukan perlawanan terhadap rezim Soeharto. Dengan tipe partai pelopor, strategi itu cukup efektif untuk menentang rezim. PRD semakin dipaksa untuk bergerak dibawah tanah ketika mereka dituding sebagai dalang aksi makar yang mengancam penguasa dan disebut ingin membangkitkan kembali PKI. Dalam peristiwa kudatuli tiga puluh pimpinan PRD ditangkap dan dipenjarakan sehingga struktur kepengurusan mereka menjadi banyak yang kosong. Namun mereka mampu untuk tetap menjalankan pergerakan di akar rumput dengan menggunakan berbagai bendera organisasi dan aliansi berbeda-beda, karena pada waktu itu PRD ditetapkan sebagai organisasi terlarang.

Membesarnya eskalasi pergerakan rakyat karena ketidakpuasan terhadap rezim Soeharto dan ditambah dengan terjadinya krisis ekonomi, telah membuat terguncangnya oligarki kekuasaan yang telah berlangsung hampir tiga dekade. Berbagai gerakan rakyat akhirnya mampu menumbangkan Soeharto dari tampuk kekuasaan. Peluang politik itu yang mencoba digunakan oleh PRD untuk mendorong proses revolusi sosial dengan tuntutan membentuk dewan-dewan rakyat. Akan tetapi kekuatan mereka yang masih kecil membuat dorongan tersebut gagal sehingga yang terjadi adalah proses reformasi politik.

Dihadapkan dengan sistem politik yang mulai terbuka, PRD yang sejak awal dibentuk untuk bergerak di sistem politik yang tertutup tidak mampu memanfaatkan sistem tersebut. Tipe partai masih bersifat ketat dan tertutup, sehingga membuat keanggotaan kecil di tengah kesadaran masyarakat yang terdepolitisasi. Sementara ketika bergerak secara parlementer di sistem

politik yang terbuka, mensyaratkan suara yang sebanyak-banyaknya. Pada Pemilu 1999 PRD mereka mengalami kebimbangan menentukan pilihan apakah bergerak dalam parlementer dengan mengikuti pemilu atau dengan memboikot pemilu tersebut. Paska pemilu 1999 upaya membangun radikalisi massa menjadi semakin sulit dilakukan. Sementara ditubuh PRD terjadi perpecahan-perpecahan.

Ada degenerasi dan deideologi dalam PRD, sehingga ideologi mereka pun bergeser menjadi Nasionalis dengan berazaskan Pancasila. Proses degenerasi ini yang mencuatkan deideologi sehingga merubah garis politik PRD dari partai pelopor yang Leninis menjadi partai kiri luas. Pada 2010 melalui kongres ke-7, PRD menggunakan gerakan parlementer sebagai strategi partai. Artinya tendensi politik mereka menjadi partai kiri luas karena untuk mengarungi pemilu mereka harus memenuhi 9 persyaratan administrasi, seperti berbadan hukum, memiliki pengurus di 100% provinsi, 75% di kabupaten/kota dan 50% kecamatan, memiliki anggota 1.000 atau 1/1.000 jumlah penduduk kabupaten dll.

Daftar Pustaka

Buku

- Aspinall, Edward. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia*. New York: Stanford University Press, 2005.
- Bourchier, David & Vedi R Hadiz. *Indonesian Politics and Society*. London & New York: Routledge-Curzon, 2005.
- Edman, Peter. *Komunisme Ala Aidit: Kisah PKI di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1965*. Jakarta: Center for Information Analysis, 2007.
- Fraly, Greg. "Indonesian Politics 1995-1996: The Making of a Crisis". Dalam Jones, G W & Hull, T H (eds). *Indonesian Assessment: Population and Human Resources*. Singapore: ISAS, 1997.
- Kautsky, John H. *Karl Kautsky: Marxism, Revolution & Democracy*. New Brunswick & London: Transaction Publishers, 1994.
- Lane, Max. *Malapetaka Di Indonesia; Sebuah Esei Renungan Tentang Pengalaman Sejarah Gerakan Kiri*. Jakarta: Djaman Baroe, 2012.
- Lane, Max. *Unfinished Nation*. Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe, 2014.

Lenin, V I. *The Revolutionary Proletariat Party of a New Type*. San Fransisco: Proletarian Publisher, 1975.

Lenin, V.I. *What is to be done? Burning Questions of Our Movement*, New York: International Publishers, 1961.

Marx, Karl. *Capital Volume 1: A Critique of Political Economy*. London: Penguin Classics, 1992.

Marx, Karl. *Kapital 1: Sebuah Kritik Ekonomi Politik Proses Produksi Kapitalis*. Jakarta: Hasta Mitra, 2004.

McVey, Ruth T. *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.

Michael R. J. Vatikiotis, *Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order*. London & New York: Routledge, 1998.

Miftahuddin. *Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani*. Jakarta: Desantara, 2004.

Novianto, Arif. "Pergulatan Gerakan Mahasiswa dan Kritik Terhadap Gerakan Moral", dalam Agus Pramusinto & Yuyun Purbokusumo (eds), *Indonesia Bergerak II: Mozaik Kebijakan Publik 2016*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & MAP UGM, 2016).

Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor, 2008.

Percy, John. "Sebuah Tanggapan untuk Strategi Partai Luas", dalam *Partai Kiri Luas atau Partai Revolusioner*. Yogyakarta: Bintang Nusantara, 2013.

Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.

Tornquist, Olle. *Penghancuran PKI*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Uhlén, Anders. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Jakarta: Mizan, 1998.

Jurnal dan Paper

- Cannon, James P. "The Revolutionary Party & Its Role in the Struggle for Socialism". *International Socialist Review*, Vol. 28 No.5, September-October 1967.
- D'Arcy, Stephen. "Strategy, Meta-strategy and Anti-Capitalist Activism: Rethinking Leninism by Re-reading Lenin". *the Journal of the Society for Socialist Studies* 5(2) (2009): 64-89.
- Fredrick Engels, "Socialism: Utopian & Scientific", dalam Karl Marx & Fredrick Engels, *Marx &*

- Engels Selected Works Volume 3*, Moscow: Progress Publishers, 1970.
- Gasper, Phill, 2010, "Rediscovering Lenin: Lenin Led a Successful Workers' Revolution, But Are His Ideas About Organization Still Relevant Today?", dalam <http://isreview.org/issue/88/rediscovering-lenin>, diakses pada 29 Juli 2015.
- Hieriej, Eric. *Globalisasi, Kapitalisme dan Perlawanan*. Yogyakarta: Institute of International Studies, 2012.
- Jatman, Darmanto. *Membongkar Misteri Sabtu Kela-bu 27 Juli 1996*. --: Lubuk Raya, 2011.
- Kautsky, Karl. *The Mass Strike*. Reprinted in Goode 1983, 1910.
- Kautsky, Karl. *The Road to Power*. --: Humanity Books, 1996.
- Lenin, V.I. 1920b. *Speech on the Role of the Communist Party*. Reprinted in Lenin 1972, 1920b: 50-54.
- Lenin, V.I. *Left-Wing Communism – An Infantile Disorder*. Reprinted in Lenin 1977 Volume 3, 1920a: 291-370.
- Lenin, V.I. *One Step Forward, Two Steps Back: The Crisis in Our Party*. Reprinted in Lenin 1977 Volume 1, 1904: 242-421.
- Lenin, V.I. *Preliminary Draft Resolution of the Tenth Congress of the R.C.P. on Party Unity*. Reprinted in Lenin 1977 Volume 3, 1921: 519-22.
- Lenin, V.I. *Report on the International Situation and the Fundamental Tasks of the Communist International*. Reprinted in Lenin, 1977 Volume 3, 1920c: 389-404.
- Nash, Andrew. "Leninism and Democracy". *Journal of Social and Political Theory*, No. 76, The Meaning of 1989 (October 1990): 19-32.
- Novianto, Arif. "Mendistorsi Hegemoni dan Anti-Esensialisme: Analisa "Mitos Kesejahteraan untuk Tambang" dalam Kerangkeng Liberalisme". *Jurnal Bhumi* 3 (No. 2 November 2017): 279 – 285.
- Novianto, Arif; Kurniawan, Lukman & Wibawa, Samodra. "Krisis Kapitalisme 2008 dan Bangkitnya Gerakan Kiri: Studi Dinamika Gerakan Partai Syriza di Yunani". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19, No 3, Maret 2016.
- Novianto, Arif; Kurniawan, Lukman & Wibawa, Samodra. "Krisis Kapitalisme dan Dinamika Gerakan Kiri dalam Pemilu: Studi Kasus di Indonesia dan Yunani". Hasil Penelitian Pusat Studi Jerman UGM 2015.
- Roosa, John. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008.
- Shandro, A. "Consciousness from without: Marxism, Lenin and the Proletariat. *Science & Society*", 59 (3) (1995): 268-297.

Sumber Internet

- Jakarta Post, 2015, "The Riots that Saw Megawati Rise to the Top", dalam <http://www.thejakar-tapost.com/news/2015/07/27/the-riots-saw-megawati-rise-top.html> diunduh pada 13 Agustus 2015.
- Lane, Max, 2009, "Demagogi Anti-Neoliberal Gagal Menarik Minat dalam Pemilihan Umum Indonesia". dalam <https://koranpembebasan.wordpress.com/2009/09/04/demagogi-anti-neoliberal-gagal-menarik-minat-dalam-pemilihan-umum-indonesia/>, diunduh pada 12 Agustus 2015.
- Pontoh, C H. 2010. *Membaca Lenin di Luar Konteks*. (online) *Jurnal IndoProgress*. <http://indoprogess.blogspot.co.id/2010/12/membaca-lenin-di-luar-konteks.html> diakses pada 31 agustur 2015.
- Saptamaji, Rolip. - . *Perjuangan-Politik-dari-luar-lingkaran-Kekuasaan : Struktur Mobilisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada Pemilu 1999*. (online). Sumber: https://www.academia.edu/5886752/Perjuangan-Politik-dari-luar-lingkaran-Kekuasaan_Struktur_Mobilisasi_Partai_Rakyat_Demokratik_PRD_pada_Pemilu_1999 diakses pada 12 Agustus 2015.
- Sudjatmiko, Budiman. *Anak-anak Revolusi: Buku 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Tempo. 14 Mei 1994. 'Orpol' Demokrasi?, dalam <https://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/05/25/0005.html> diakses pada 12 April 2015.

TENTANG PENULIS

Indriana Kartini

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2003 hingga saat ini. menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2002. Gelar Master of International Politics diraih dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Saat ini penulis tergabung dalam Tim Penelitian Perbatasan P2 Politik LIPI. Penulis dapat dihubungi melalui email: indriana.kartini@gmail.com

Meutya Viada Hafid

Penulis merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar sejak 2009 hingga kini. Lahir di Bandung pada 3 Mei 1978 dan memulai karirnya sebagai jurnalis di Metro TV. Penulis menyelesaikan pendidikan pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. adapun penulis dapat dihubungi melalui email: meutyahafidinfo@gmail.com

Arif Novianto

Penulis merupakan Asisten peneliti di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Peneliti di Pusat Studi Jerman UGM pada tahun 2015. Penulis dapat dihubungi melalui email: arif.novianto@mail.ugm.ac.id

Lukman Kurniawan

Penulis merupakan Alumnus Departemen Sosiologi FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman pada tahun 2015.

Samodra Wibawa

Penulis merupakan Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman.

Siswanto

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia. Tergabung dalam tim penelitian Politik Luar Negeri, penulis sudah banyak menghasilkan karya-karya baik buku maupun jurnal. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: sish_jakarta@yahoo.com

Awani Irewati

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bidang kajiannya adalah perbatasan. Sudah banyak karya berupa buku maupun jurnal yang ditulis oleh beliau. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: irewati62@gmail.com

M. Fakhry Ghafur

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tergabung dalam tim penelitian Agama dan Politik. Bidang kajiannya meliputi Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Penulis dapat dihubungi di email: fakhryghafur@gmail.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis merupakan peneliti madya di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fokus kajiannya adalah Otonomi dan Pemerintahan Daerah. Saat ini penulis tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Penulis dapat dihubungi melalui email: nyimas.letty@gmail.com; nyimas.letty@yahoo.com

Defbry Margiansyah

Penulis merupakan kandidat peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia merupakan Alumnus *Global Studies Programme Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg*, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

